

**PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
TERHADAP SENGKETA PENSERTIFIKATAN TANAH
DITINJAU BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960/UNDANG-UNDANG
POKOK AGRARIA DI DESA ADAT PADANGBAI
(STUDI KASUS SENGKETA PENSERTIFIKATAN TANAH ANTARA PT ASDP
DENGAN DESA ADAT PADANGBAI)**

Oleh:

I Kadek Krisna Pradipta, NIM 1714101064

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya menyelesaikan sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai, (2) Solusi dari Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, di Desa Adat Padangbai serta di Kantor PT ASDP cabang Padangbai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probabilitas dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling*. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya penyelesaian sengketa antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai adalah dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, yang bertujuan untuk mendapatkan hasil putusan yang bersifat kolektif dan obyektif dan juga meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik. Namun pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem belum menemukan jalan keluar ataupun kesepakatan, sebab adanya hambatan - hambatan yang terjadi saat pelaksanaan mediasi, yang salah satunya adalah adanya para pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi tersebut, sehingga dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem perlu memikirkan solusi untuk penyelesaian sengketa antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai.

Kata Kunci : peranan, kantor pertanahan kabupaten karangasem, sengketa tanah

**THE ROLE OF LAND OFFICE IN KARANGASEM DISTRICT TOWARDS
LAND CERTIFICATE DISPUTES REVIEWED UNDER THE LAW NO. 5
YEAR 1960 / AGRARIAN LAW IN DESA ADAT PADANGBAI
(CASE STUDY ABOUT LAND CERTIFICATE DISPUTES BETWEEN PT
ASDP WITH DESA ADAT PADANGBAI)**

By :
I Kadek Krisna Pradipta, NIM 1714101064
Law Department

ABSTRACT

The purpose of this research are to find out : (1) The role of Land Office in Karangasem District in an attempt to resolve the land certificate disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai, (2) The solution from Land Office in Karangasem District in an attempt to resolve the land certificate disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai. Location of this research was conducted at Land Office in Karangasem District, in Desa Adat Padangbai also in Padangbai branch of PT ASDP office. This study use empirical legal research. The technique that used in this research is non probability technique which used in determining the subject of the research with Purvosive Sampling technique. For data processing and analysis data using qualitative method. The result showed that the role of Land Office in Karangasem District in an attempt to resolve the disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai is to make a mediation to the both parties, in order to get the results of decisions that are collective and objective and also minimize the claims over the disputes and conflict. However the mediation that was held by Land Office in Karangasem District was not find a way out or deals because of there are some obstacle when the mediation happened, which one of the obstacle is there is a party that did not attend the mediation which make Land Office in Karangasem District needs to find other solution for resolve the disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai.

Key Words : *the role, government office in Karangasem District, land disputes*